

**2LITERATURE REVIEW STUDY: ACCOUNAILITY OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT LITERATURE REVIEW STUDY: VILLAGE FUND
MANAGEMENT ACCOUNTABILITY**

**2LITERATURE REVIEW STUDY: ACCOUNAILITY OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT STUDI LITERATUR REVIEW: AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA**

Sri Ayem¹, Umi Wahidah², Wirandi³, Fransiska Theodosia Peni Yan⁴, Anisa Alfiana⁵, Dini Fitriarningsih⁶, Sisilia Marlita Arce Kaka⁷, Karolina Tunga⁸

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta^{1,2,3,4,5,6,7,8}

sriayemfeust@gmail.com, umi.wahidah@ustjogja.ac.id, anisaalfiana02@gmail.com,
dinifl1486@gmail.com, randhysudirman98@gmail.com, karolinatunga410@gmail.com,
sisiliamarlitaarcekaka13@gmail.com, wuranedis@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and analyze the influence of apparatus competence, internal control systems, organizational commitment and community participation on village fund management accountability. This research method uses a Systematic Literature Review (SLR) or Library Research or library research approach. This reference source was obtained from 20 journals published through the Google Scholar database. The results of the study show that apparatus competence, internal control systems, organizational commitment and community participation have an effect on the accountability of managing village funds. The implications of the findings of this study are to encourage accountable village fund management through increasing the competency of village fund management officials, village government organizational commitment, and community participation.

Keywords: *Village Apparatus Competence, Organizational Commitment, Internal Control System, Community Participation.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) atau Studi Kepustakaan (Library Research) atau riset kepustakaan. Sumber referensi ini didapatkan dari 20 jurnal yang diipublikasikan melalui database google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan salah satu pemberian wewenang dari pemerintahan pusat yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan di Negara Indonesia. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (Nadir, 2013). Desentralisasi dapat membagi wewenang yang cukup luas pada pemerintahan di tingkat daerah guna mengelola wilayah ke pemerintahannya yang diberikan (Mada et al., 2017). Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengeluarkan kebijakan yaitu

pembentukan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, diantaranya kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, teknologi yang digunakan, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus secepatnya dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang telah diharapkan. Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban atas pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, berapa dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Secara teoritis, akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia (Ferina et al., 2016). Hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparat yang berfungsi sebagai pelayanan yang memiliki kewajiban untuk dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga pada saat pengambilan keputusan yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Perundang-undangan tentang desa sudah menetapkan desa menjadi kunci utama pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat. Wewenang yang diberikan kepada desa dan sumber daya yang cukup untuk mengatur wilayah yang dipunya untuk memaksimalkan perekonomian. Pemerintah setiap tahunnya selalu memberikan dana untuk pembangunan desa. Dana tersebut diharapkan dapat dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa sesuai peraturan supaya tidak ada tindakan kecurangan, korupsi juga sebagainya. Pendanaan desa

dipergunakan dalam membangun serta mensejahterakan warga desa dan merupakan salah satu dari wujud pemerintahan desa dalam mengukur berhasil atau tidak dalam menjalankan amanat dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah dalam mengelola dana desa yang baik.

Kondisi keuangan dana desa saat ini menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Pada tahun 2022 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia (Tatag Prihantara Yuwono, 2022). Selain itu, dengan telah adanya bukti kasus tindakan pidana korupsi yang menyeret aparat desa aktif maupun non aktif, misalnya di Yogyakarta mantan lurah didakwa melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 627 juta (Yuwono & Rusiana, 2022).

Penelitian dana desa masih sangat menarik untuk diteliti, disebabkan menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) kasus korupsi dana desa merupakan kasus tertinggi dalam 10 besar kasus korupsi berdasarkan lembaga pada tahun 2021. Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data ini tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparat desa mencapai total Rp 111 miliar. Dari pantauan ICW, teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang,

pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka diperlukan peran aparatur untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa (Ferina et al., 2016).

Kasus-kasus tersebut menjadi fenomena yang mengerikan, apalagi jika kita melihat bahwa sesungguhnya dana desa merupakan hak masyarakat untuk dapat membangun infrastruktur desanya serta membangun kehidupan ekonomi yang lebih layak dan berdaya guna. Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang turut mendukung dalam pencegahan tindakan pidana korupsi di dana desa yakni dengan mengeluarkan PERMENDES PDTT Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan kajian literatur dari 20 jurnal dan didukung oleh fenomena yang terjadi, ditambah dengan adanya data dari ICW, maka peneliti menyalurkan gagasannya untuk dilakukannya penelitian yang mendalam mengenai akuntabilitas dana desa

Tinjauan Pustaka Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Kepentingan organisasi dari kepentingan pribadinya. Asumsi dari teori ini yaitu berdasarkan sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, memiliki integritas, bertanggung jawab atas setiap tindakannya, serta jujur kepada semua pihak. Sebagai bentuk untuk mencapai

tujuan organisasinya serta bertindak sesuai keinginan pemilik organisasi (participal) (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini sangat cocok untuk diterapkan pada organisasi pemerintahan karena lebih cenderung dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Prinsip yang digunakan steward (pemerintah) adalah steward merasa mempunyai tanggung jawab besar dalam alokasi dan pengelolaan sumber daya yang ada dengan bijaksana untuk pemenuhan keinginan pribadinya, tetapi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas steward merasa aktualisasi diri dengan meningkatkan dan mendapatkan kepercayaan publik (Alfasadun et al., 2018). Implikasi teori ini dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang bisa dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya.

Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) berpendapat agency theory merupakan teori untuk menerangkan hubungan kontraktual antar pihak yang terlibat, terutama pengukuran akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengertian tersebut menunjukkan adanya pertentangan dan perbedaan dalam teori agensi yang menyebabkan konflik antara pemilik (principal) dan manajer (agent). Dalam instansi pemerintah menjelaskan bahwa masyarakat desa sebagai principal atas kinerja perangkat desa sebagai agent.

Teori Tindakan Komunikatif (The Theory of Communicative Action)

Teori Tindakan komunikatif mengacu pada tindakan yang ditujukan oleh norma-norma yang telah disepakati

Bersama, hal ini berdasarkan harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, khususnya bahasa sehari-hari sebagai medium bagi tindakan tersebut (Ayem & Kusumasari, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) atau Studi Kepustakaan (Library Research) atau riset kepustakaan. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data serta informasi dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Penelitian dengan Systematic Literature Review (SLR) terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berpengaruh positif yaitu antara lain (Adnyana, 2022), (Erawati & Hamanay, 2022), (Meling et al., 2021), (Ayem & Kusumasari, 2020), (Ayem & Rofikoh, 2020), (Natsir et al., 2021), (Gwijangge et al., 2021), (Ivana, 2019), (Riyatna & Gayatri, 2021), (Arfiansyah, 2020), (Widyatama & Novita, 2017), (Mualifu et al., 2019), (Nafidah & Suryaningtyas, 2016), (Herlina et al., 2021). Kemudian untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak berpengaruh positif antara lain yaitu, (Ladewi et al., 2020), (Dewi et al., 2021), (Anugrah et al., 2022).

Kriteria jurnal yang dipilih dalam penelitian ini adalah membahas mengenai Akuntansi Dana Desa. Rujukan yang digunakan berupa 20 jurnal pada table dibawah ini:

Tabel 1.

| No | Nama Jurnal | Jumlah jurnal | Tahun |
|--------------|--|---------------|-------|
| 1 | Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika | 2 | 2020 |
| 2 | Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora | 1 | 2020 |
| 3 | The International Journal of Accounting and Business Society | 1 | 2020 |
| 4 | Jurnal Kajian Bisnis | 2 | 2020 |
| 5 | Jurnal Akuntansi Aktiva | 1 | 2020 |
| 6 | Journal Competency of Business | 1 | 2020 |
| 7 | International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) | 2 | 2020 |
| 8 | Dinasti Internasional Journal of Management Science | 1 | 2021 |
| 9 | American Journal of Humanities and Social Science Research (AJHSSR) | 1 | 2021 |
| 10 | International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science | 1 | 2021 |
| 11 | International Journal Bussines Management and Economic Review | 1 | 2021 |
| 12 | Jurnal Ilmiah | 1 | 2021 |
| 13 | Journal Akuntansi Manajerial | 1 | 2021 |
| 14 | Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa | 1 | 2021 |
| 15 | E-Jurnal Akuntansi | 1 | 2021 |
| 16 | Jurnal Akuntansi Profesi | 1 | 2022 |
| 17 | Jurnal Akuntansi | 1 | 2022 |
| Total | | 20 | |

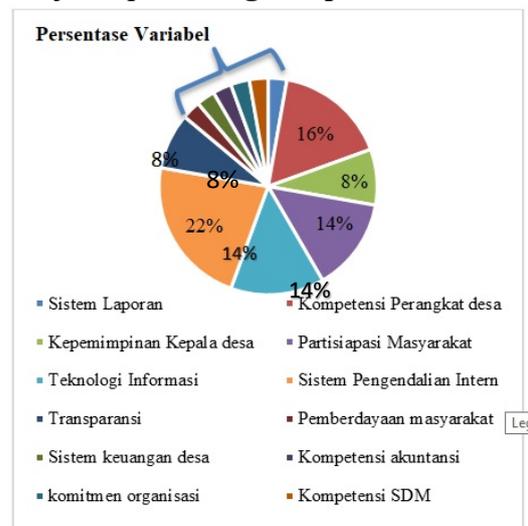
yang terdiri dari jurnal nasional dan jurnal internasional dengan jangka waktu publikasi 3 tahun terakhir. Data yang diperoleh dari Google Scholar, Jurnal Akuntansi Dewantara dengan penulis Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel yang digunakan merupakan variabel yang berkaitan dengan akuntabilitas dana desa. Beberapa variabel terdapat yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel yang dominan digunakan antara lain sistem pengendalian intern, kompetensi perangkat desa, diikuti dengan partisipasi masyarakat. Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah publik

(Widyatama & Novita, 2017). Kompetensi perangkat desa menjadi salah satu faktor internal dan menjadi suatu yang penting dalam akuntabilitas dana desa, hal ini dikarenakan kompetensi yang baik secara tidak langsung akan menunjang pengoptimalan pengelolaan dana desa (Aryani et al., 2020). Partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal membantu dan mengawasi pemerintah. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk menambah kesiapan seseorang dalam mengambil keputusan atas pengawasan dalam segala kegiatannya (Putra & Rasmini, 2019).

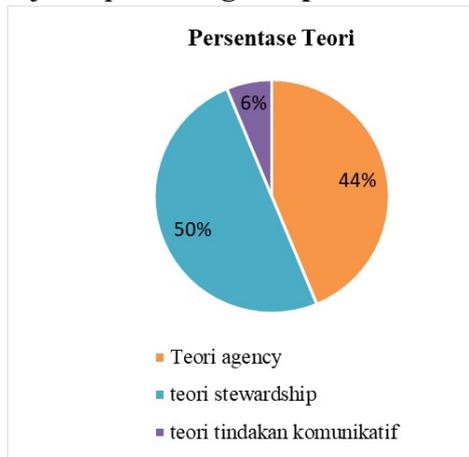
Selain variabel yang telah disebutkan, terdapat variabel lain yang juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti teknologi informasi, kepemimpinan kepala desa, transparansi pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, kompetensi akuntansi, komitmen organisasi, dan sistem laporan. Untuk lebih jelas mengenai persentase variabel sudah disajikan pada **Diagram pie-1**.



Gambar 1. Diagram pie-1

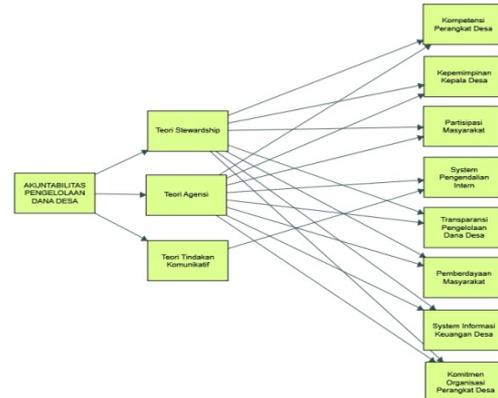
Selanjutnya mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun teori yang dominan dalam penelitian ini, yaitu teori agensi, diikuti teori stewardship, dan yang minim muncul

adalah teori tindakan komunikatif, hal ini dijabarkan pada Gambar-1 mengenai pemetaan teori. Keterkaitan teori keagenan (agency theory) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (agents) dengan masyarakat (principals), selanjutnya teori stewardship yang memberikan penjelasan peran penting dari pemerintah desa yaitu sebagai lembaga yang merupakan tempat bagi aspirasi masyarakat, dan yang terakhir yaitu teori tindakan komunikatif. Berdasarkan teori yang digunakan pada artikel penelitian yang dikaji dalam studi literatur review ini, maka dapat disimpulkan bahwa teori agensi lebih dominan yaitu 50%, teori selanjutnya yaitu teori stewardship yaitu 44%, dan untuk teori yang paling sedikit digunakan yaitu teori Tindakan komunikatif sebanyak 6% yang disajikan pada **Diagram pie-2**.



Gambar 2. Diagram pie-2

Berdasarkan dari 20 jurnal yang telah direview yang membahas mengenai akuntabilitas dana desa, dan diperjelas dengan pemetaan teori yang digambarkan pada **Gambar-1**



Gambar 3. Pemetaan Teori

Adapun hasil telaah literatur penelitian terdahulu diperoleh sebagai berikut:

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan dana desa memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang memadai. Kompetensi perangkat desa ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Untuk itu kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Individu yang memiliki kompetensi tinggi serta sudah mengemban jabatan yang sesuai kemampuannya akan lebih baik baik dalam menjalankan tugas yang diemban (Ivana, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Peneliti sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas, yang berarti pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sujatnika & Sulindawati, 2022)

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Kepala desa merupakan pimpinan dalam suatu organisasi desa yang memiliki tanggungjawab untuk mempengaruhi bawahannya atau dapat disebut masyarakat desa untuk mencapai tujuan yang diprogramkan sebelumnya (Naelavika et al., 2018). Kepemimpinan dalam pengelolaan dana desa mengacu pada kepemimpinan (Riyatna & Gayatri, 2021). Oleh sebab itulah kepemimpinan kepala desa berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Naelavika et al., 2018).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntailitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk dilibatkan dalam dalam perencanaan pembangunan (Sujatnika & Sulindawati, 2022). Salah satu alasan pengelolaan dana desa memerlukan partisipasi masyarakat yaitu karena tujuan dari dana desa tersebut ialah pemberdayaan masyarakat. Untuk itu tujuan dari partisipasi tidak lain guna menambah seseorang yang bersangkutan secara serta merta maupun tidak pada pembentukan dala mengambil keputusan atas pengawasan dalam segala kegiatannya. Untuk itu partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Dikarenakan keterlibatan warga merupakan hal yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pemerintah desa (Anugrah et al., 2022). Hal ini juga sejalan dengan penelitian dan juga penelitian (Umaira & Adnan, 2019).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negaraa, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan”. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas (Arfiansyah, 2020). Oleh karena itu sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) dan juga penelitian (Widyatama & Novita, 2017).

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan juga masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut (Anugrah et al., 2022). Transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Mualifu et al., 2019) dan juga penelitian yang pernah diteliti oleh (Herlina et al., 2021).

Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Pemberdayaan masyarakat kuraang berpengaruh terhadap akntabilitas dana desa. Dikarenakan pemberdayaan masyarakat lebih condong terhadap kesejahteraan msyarakat

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang akurat akan mempengaruhi informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika semakin baik sistem informasi keuangan desa maka akan semakin baik akuntabilitas dana desa. Untuk itu sistem informasi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Rediastiti, 2022).

Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi berperan penting bagi suatu individu dan organisasi, yang mana individu tersebut berada dan membuat anggotanya merasa nyaman. Komitmen organisasi sangat berkaitan dengan akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota organisasi. Semakin baik komitmen organisasi pada organisasi, maka otomatis anggota di dalam organisasinya akan memiliki rasa tanggungjawab dan melaksanakan tugasnya secara maksimal, sehingga akuntabilitas dapat terlaksana secara teratur dan sesuai. Untuk itu komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini diperkuat

oleh penelitian sebelumnya yaitu (Nurdin, 2019).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mereview penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana. Variabel yang dominan digunakan oleh peneliti pada beberapa artikel penelitian tersebut yaitu variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Hasil penelitian merokemendasikan penelitian selanjunya terkait pengelolaan dana desa untuk membahas variabel yang akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, P. G. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Desa di Kecamatan Sidemen Kabuoaten Karangasem. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 48–61.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, sri devi, & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding, 2017*, 978–979.
- Anugrah, K. A., Prabowo, A. A., & Wardani, D. K. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 13–28. <https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5562>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Aryani, N. P. D. E., Werastuti, r. D. N. S., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 179–194.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Ayem, S., & Rofikoh, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabuapten Kebumen). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(1), 84–92.
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 190–203. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2040>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian journal of Management*, 16(June 1991), 49–66.
- Erawati, T., & Hamanay, A. S. (2022). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 15–22.
- Ferina, S. I., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam

- Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336.
- Gwijangge, N., Jati, I. K., Asri Dwija Putri, I. G. A. M., & Wirawati, N. G. P. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1549. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p16>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4, 419–433.
- Ivana, L. M. L. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J., -, W., -, A., & Subowo, H. (2020). the Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–64. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2020.28.2.3>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Meling, L., Wirawati, P. I., Wibawa, N. K. M., Negara, I. G. J. P., Anggara, K. M. A., & Putrawan, I. G. N. K. A. (2021). Reviewing the Village Head's Leadership, Village Device Competence, and Community Participation from the Financial Management Accountability of Village Funds. *Proceedings of the 6th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2021)*, 197(Teams), 602–607. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211124.087>
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of economic, business and engineering*, 1(1), 49–59.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Naelavika, Hafidhah, & Herli, M. (2018). *Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap*

- akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan kangayan*. 1–17.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Natsir, M., Diantimala, Y., & A. Djalil, M. (2021). the Influence of Understanding of Financial Management Apparatus, the Utilization of Information Technology and Internal Control System on the Accountability of Village Fund Management in Aceh Singkil District, Province of Aceh, Indonesia. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 04(06), 198–208. <https://doi.org/10.35409/ijbmer.2021.3334>
- Nurdin, Y. (2019). *Pengaruh kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Rediastiti, K. (2022). *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal*. 1(2), 2829–5277.
- Riyatna, K. D. D., & Gayatri, G. (2021). Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Denpasar Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3273. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p18>
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. (2022). *Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung*. <http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Tatag Prihantara Yuwono. (2022). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. 02(02), 1–20.
- Yuwono, M., & Rusiana, D. A. (2022). *Diduga Korupsi Dana Desa yang Rugikan Negara Rp 627 juta, Mantan Lurah di Gunungkidul Ditahan*. Kompasiana.